

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BALAI EKONOMI
DESA (BALKONDES) KARANGREJO KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN
MAGELANG**

Ajeng Diah Larasati¹, Herbasuki Nurcahyanto², Aufarul Marom³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Community empowerment through Balkondes Karangrejo is the programs of Ministry of BUMN that uses CSR funds in the context of local economic development by utilizing the potentials that exist in the village environment. The Karangrejo Village community has received benefits from the existence of Balkondes Karangrejo, including an increase in income through PADes, the appointment of local potential, and the construction of facilities and infrastructure. The purpose of this research is to analyze the stages of community empowerment as well as the driving and inhibiting factors in the implementation of community empowerment through Balkondes Karangrejo. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The site of this research is Karangrejo Village which is located in Borobudur District, Magelang Regency. Data collection techniques in this study were through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the research are seen from the three stages of community empowerment, namely the stages of awareness, capacity building, and empowerment at Balkondes Karangrejo have not run optimally as evidenced by the obstacles still found at each stage of community empowerment. The driving factors of community empowerment through Balkondes Karangrejo are motivation and government policies, while the inhibiting factors of community empowerment through Balkondes Karangrejo are resources and availability of infrastructure and access.

Keywords: Village Economic Center, Community Empowerment, Stages of Empowerment

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, terjadi perpindahan kewenangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dan mengalami pergeseran dari model sentralistik ke model

desentralistik. Hal tersebut merupakan perwujudan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan manajemen sumber daya ekonomi daerahnya secara mandiri sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan

peraturan tersebut bertujuan untuk memungkinkan pengelolaan urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan tugas pembantuan dan prinsip otonomi sehingga dapat melaksanakan mempercepat perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat di suatu daerah dengan memperhatikan daya saing kawasan dan memanfaatkan keragaman sumber daya dan potensi daerah melalui pemberdayaan, peningkatan pelayanan, dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan sektor pariwisata adalah salah satu upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat karena setiap daerah mempunyai berbagai potensi yang mampu dimanfaatkan menjadi objek wisata. Selain itu, pariwisata dianggap sebagai industri yang paling menjanjikan karena dapat meningkatkan PDB negara, menghasilkan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat perekonomian nasional. Kabupaten Magelang menjadi salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki berbagai peluang pariwisata yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang saat ini menjadi destinasi super prioritas dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara dan pendapatan daerah. Namun, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat sekitar di Kecamatan

Borobudur yang masih hidup begitu sederhana, bahkan hidup di garis kemiskinan karena tidak mendapatkan keuntungan finansial dari tempat wisata tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh pendapatan per kapita Kecamatan Borobudur yang hanya mencapai Rp7,7 juta antara tahun 2011 dan 2015, yang menempatkannya di urutan keenam dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang secara keseluruhan (Fitriyanti, 2018).

Tabel 1.1 Perbandingan Pendapatan Perkapita Tiga Kecamatan di Kabupaten Magelang Periode 2011-2015

Nama Kecamatan	Pendapatan Perkapita
Kecamatan Srumbung	Rp15.400.000
Kecamatan Ngablak	Rp11.000.000
Kecamatan Borobudur	Rp7.700.000

Sumber: <https://data.magelangkab.go.id/opendata>, 2023.

Capaian tersebut tergolong sangat kecil jika mengingat wisata Candi Borobudur yang sudah terkenal tidak hanya di dalam negeri melainkan juga internasional. Jika dibandingkan dengan dua kecamatan lain di Kabupaten Magelang berdasarkan Tabel 1.1 di atas, yakni Kecamatan Ngablak yang terletak di lereng Gunung Merbabu dengan pendapatan mencapai 11 juta dan Kecamatan Srumbung yang terletak di kaki Gunung Merapi

dengan pendapatan yang mencapai Rp15,4 juta, maka pendapatan Kecamatan Borobudur pada waktu itu yang dianggap sebagai jantung pariwisata Magelang bahkan masih jauh di bawah dua kecamatan tersebut. Dalam rangka merespons permasalahan tersebut juga untuk meningkatkan taraf dan pertumbuhan ekonomi desa di kawasan Candi Borobudur, Kementerian BUMN menjalankan salah satu program prioritas, yaitu dengan mendirikan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) pada 20 desa di Kecamatan Borobudur (Adhian, 2017).

Balai Ekonomi Desa (Balkondes) merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk memberikan pengaruh yang lebih besar kepada desa-desa di sekitar tempat wisata populer agar mereka dapat memperoleh keuntungan finansial dari bidang pariwisata. Program tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sehingga terbentuk kemitraan antara BUMN Sponsor atau Pendamping yang mewakili Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) (Filia dan Alfirdaus, 2020). Hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan potensi desa agar nantinya dapat bernilai jual sehingga mampu dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing desa di Kecamatan Borobudur. Secara khusus, adanya Balkondes ini dimaksud untuk merangsang pertumbuhan pariwisata di Kawasan Candi Borobudur sehingga dapat menjadi langkah awal bagi warga desa untuk menggali, mengenalkan, dan mengembangkan beragam potensi desanya. Tujuan lain dari pendirian Balkondes adalah sebagai alternatif destinasi wisata selain Candi Borobudur dan untuk meningkatkan jumlah lama kunjungan wisatawan karena disarankan untuk bersafari di sekitar desa-desa terdekat sehingga dapat berkontribusi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Balkondes Karangrejo menjadi salah satu balkondes di Kecamatan Borobudur yang terletak sekitar 3 kilometer ke arah selatan dari Candi Borobudur, tepatnya di Dusun Bumen Djelapan, Desa Karangrejo. Balkondes ini diusung sebagai bentuk pelibatan aktif pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara BUMN Sponsor, yaitu PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan BUMDes Bumi Mulia Karangrejo. Berbagai usaha ada di Balkondes Karangrejo, meliputi unit usaha *homestay*, unit usaha *restaurant*, unit penyediaan paket wisata safari, dan unit-unit UMKM lainnya yang berasal dari Desa Karangrejo sendiri. Berikut adalah data

jumlah pengguna jasa Balkondes Karangrejo dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

Tabel 1.2 Jumlah Pengguna Jasa Balkondes Karangrejo Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Pengguna Jasa Balkondes		Total
	Balkondes	Homestay	
2017	3.927	90	4.017
2018	4.163	851	5.014
2019	5.783	1.911	7.694
2020	4.476	1.454	5.930
2021	4.336	1.856	6.192
2022	10.629	3.971	14.663

Sumber: Arsip Balkondes Karangrejo, 2023.

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, sejak dibangunnya Balkondes Karangrejo pada tahun 2017 hingga tahun 2019 telah mengalami peningkatan jumlah pengguna atau pengunjung yang signifikan, baik dari yang hanya sekadar berkunjung untuk menikmati panorama di Balkondes Karangrejo atau membeli produk-produk UMKM yang ada, dan yang melakukan penginapan di *Homestay* Karangrejo. Meskipun pada tahun 2020 jumlah pengunjung Balkondes mengalami tren penurunan yang cukup signifikan, yakni hanya mencapai 5.930 pengunjung akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilaksanakannya pembatasan mobilisasi masyarakat. Hal tersebut tidak berlangsung lama karena di tahun 2022 jumlah pengunjung mengalami

peningkatan kembali yang sangat signifikan hingga mencapai 14.663 pengunjung. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo, terutama melalui hadirnya Truntum Gasblock Borobudur yang baru dibangun pada tahun 2022 lalu yang turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengguna jasa Balkondes Karangrejo.

Dikutip dari laman berita *Kompas.com*, Sandiaga Uno yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menuturkan bahwa *homestay* di Balkondes Karangrejo dengan standar kelas dunia ini menjadi salah satu yang terbaik karena unsur penataannya dan kebersihan lingkungannya. Balkondes Karangrejo menyediakan lebih dari sekadar *homestay*, yakni menawarkan salah satu paket wisata safari atau tur keliling dusun dengan mobil *Volkswagen* dan para tamu dapat menikmati berbagai pertunjukan seni di pendopo terbuka atau panggung seni. Di wilayah Desa Karangrejo juga terdapat objek wisata Punthuk Setumbu, Bukit Rhema, dan Bukit Barede yang berlokasi tidak jauh dari *Homestay* Balkondes Karangrejo yang dikelola oleh BUMDes Bumi Mulia Karangrejo. Tak hanya itu, Balkondes Karangrejo juga meraih empat dari tujuh nominasi penghargaan pada Borobudur Awards 2019, yakni Balkondes

Terbaik, Karyawan Terbaik, Balkondes Terbersih, dan *Best of The Best* Balkondes. Perolehan penghargaan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa dan masyarakatnya untuk terus berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan dalam pengembangan Balkondes Karangrejo.

Balai Ekonomi Desa Karangrejo dikembangkan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan mempekerjakan individu-individu yang merupakan penduduk asli desa tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, khususnya bagi pemuda-pemuda di Desa Karangrejo. Harapannya pemuda tersebut dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat Desa Karangrejo untuk turut aktif mengelola dan mengembangkan Balkondes Karangrejo sebagai bentuk upaya pemberdayaan.

Keberadaan Balkondes Karangrejo ini sangat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD Desa Karangrejo sehingga perlahan masyarakat desa dapat keluar dari angka kemiskinan, yang mana dahulunya sekitar separuh dari masyarakat yang tinggal di Desa Karangrejo menerima bantuan langsung tunai (BLT) karena termasuk salah satu desa miskin di Kecamatan Borobudur. Sampai saat ini, Desa Karangrejo telah mandiri dan berhasil melepaskan diri dari garis kemiskinan dan mampu menghasilkan

lebih dari Rp2,7 miliar dalam satu tahun. Jika dirinci, pendapatan tersebut bersumber dari Punthuk Setumbu yang menghasilkan pendapatan sekitar Rp2 miliar per tahun, sementara Balkondes diperkirakan menghasilkan pendapatan sebesar Rp700 juta. Berikut adalah tabel kontribusi Balkondes Karangrejo terhadap PAD Desa Karangrejo setiap tahunnya yang mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.

Tabel 1.3 Kontribusi Balkondes Karangrejo Terhadap PAD Desa Karangrejo

No.	Tahun	Jumlah PAD
1.	2017	Rp37.407.500
2.	2018	Rp133.224.000
3.	2019	Rp129.944.000
4.	2020	Rp22.645.000
5.	2021	Rp133.022.000
6.	2022	Rp151.194.000
Jumlah		Rp607.436.500

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Karangrejo, 2023.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara saat penulis melakukan survei pra-penelitian, ditemukan fenomena-fenomena dalam pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo. Fenomena-fenomena yang ditemukan, yaitu rendahnya mutu sumber daya manusia yang berakibat pada kesadaran masyarakat tentang pengembangan pariwisata juga masih rendah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Supervisor Balkondes

Karangrejo, Yuspika Maharani, bahwa pengembangan kualitas sumber daya manusia secara intensif hanya dilakukan pada awal pembangunan Balkondes Karangrejo saja. Kemudian, ia juga menuturkan bahwa tahap awal pemberdayaan kepada masyarakat desa melalui Balkondes Karangrejo salah satunya adalah pelaksanaan perekrutan pegawai, di mana didominasi oleh pemuda-pemuda asli Desa Karangrejo. Namun, hal tersebut terbukti bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo sendiri belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga partisipasi masyarakatnya sendiri dapat dikatakan masih rendah.

Menurut data jumlah penduduk Desa Karangrejo tahun 2023 jika dilihat berdasarkan jenis pekerjaannya, penduduk yang tidak atau belum bekerja atau pensiunan atau mengurus rumah tangga memiliki jumlah penduduk paling banyak apabila dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya, yakni sebanyak 865 orang. Kondisi tersebut kemudian semakin diperparah ketika pandemi Covid-19 melanda, sebagian besar penduduk Desa Karangrejo kehilangan mata pencahariannya yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Data tersebut mendukung pernyataan bahwa belum semua masyarakat di Desa

Karangrejo ikut berpartisipasi dalam Balkondes Karangrejo.

Tabel 1.4 Penduduk Desa Karangrejo Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2023

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja/ Mengurus Rumah Tangga/ Pensiunan	865
2.	Pelajar/ Mahasiswa	508
3.	PNS/ TNI/ Kepolisian RI	40
4.	Perdagangan/ Pedagang	240
5.	Petani/ Pekebun/ Peternak/ Perikanan	284
6.	Karyawan Swasta	363
7.	Karyawan BUMN/ BUMD/ Honorer	9
8.	Buruh/ Pembantu Rumah Tangga	316
9.	Dosen/Guru	24
10.	Wiraswasta	119
11.	Lainnya	69
Total		2.837

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Karangrejo, 2023.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Karangrejo, Triyantoro, yang mengungkapkan kelemahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo, yakni terletak pada sistem manajemennya. Belum adanya perencanaan dalam jangka waktu secara pasti dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Selama ini, tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo masih berprinsip pada “*learning by doing*”. Selain itu, kondisi infrastruktur dan

lingkungan fisik masih menjadi kendala pada pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo. Kondisi jalan atau akses menuju Balkondes Karangrejo belum bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan bermuatan besar, seperti bus besar. Hal ini berdampak pada terhambatnya tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo karena akan menurunnya jumlah pengunjung dan tidak sedikit yang membatalkan perjalanannya untuk mengunjungi Balkondes Karangrejo. Dari beberapa fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

D. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Administrasi publik didefinisikan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) sebagai proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya dan personil publik untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengatur sejumlah keputusan kebijakan publik. Pendapat tersebut selaras dengan definisi bahwa administrasi publik adalah runtutan kegiatan yang meliputi perumusan, pengimplemetasian, dan pengevaluasian kebijakan dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan negara (Banga, 2018: 85).

Paradigma Administrasi Publik

Pandangan Thomas Kuhn (dalam Pasolong, 2014: 27) terhadap paradigma

adalah seperangkat keyakinan, prosedur, gagasan fundamental, atau pendekatan terhadap pemecahan persoalan yang diterima oleh publik pada waktu tertentu. Berdasarkan paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014: 28), penelitian ini termasuk dalam paradigma keenam yang merupakan paradigma terakhir atau disebut *Good Governance* karena pelaksanaannya terdapat pelibatan partisipasi masyarakat serta peran pemerintah dan pihak swasta dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk dapat mengelola pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berkelanjutan dan tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Manajemen Publik

Manajemen publik adalah proses para manajer publik di lembaga-lembaga pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, sesuai dengan arahan kebijakan publik. Hubungan antara manajemen publik dan pemberdayaan masyarakat serupa dengan hubungan antara keterampilan organisasi manajer dalam pengorganisasian, di mana pemberdayaan adalah proses di mana pemerintah menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengelola dan mengorganisir masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mengharuskan masyarakat untuk menghasilkan sesuatu sendiri, tidak membuat mereka bergantung pada berbagai upaya amal. Hal ini selaras dengan pandangan Ardito (dalam Subejo dan Supriyanto, 2004) bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kapasitas dan kemandirian kepada masyarakat lokal dalam hal ekonomi, geografi, dan sosial untuk merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya melalui tindakan kolektif

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan digambarkan sebagai sebuah proses, di mana proses itu sendiri berperan penting dalam mengevaluasi pemberdayaan yang dilakukan secara keseluruhan. Untuk mengevaluasi dan memeriksa kondisi pemberdayaan saat ini, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), antara lain:

- 1) Penyadaran, yakni sasaran pemberdayaan mendapatkan pencerahan berupa pemahaman bahwa mereka memiliki alat yang dapat digunakan untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pengenalan pada masyarakat terkait kondisi lingkungan, seperti potensi dan persoalan. Fenomena yang diteliti adalah aspek potensi dan permasalahan di lingkungan wilayah serta aspek sosialisasi mekanisme dan prosedur.

- 2) Pengkapasitasan atau dikenal "*capacity building*". Hal ini mengimplikasikan bahwa sebelum memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada seseorang, mereka harus kompeten sehingga dapat memberikan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat yang nantinya dapat menciptakan kemampuan dan keterampilan untuk menjalankan potensi yang dimiliki. Fenomena yang diteliti adalah bentuk pelatihan dan pendampingan serta koordinasi.
- 3) Penedayaan, pemberian daya, atau pemberdayaan itu sendiri. Pemberian ini mengakomodasi aspirasi, memberikan peluang sesuai dengan kepemilikan kemampuan dan kompetensi masyarakat, serta mendorong evaluasi diri atas hasil dari keputusan yang telah diambil sebelumnya. Fenomena yang diteliti adalah kecakapan masyarakat dalam memanfaatkan peluang usaha, peran *stakeholders*, serta bantuan modal untuk pemberdayaan masyarakat.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Faktor pendorong dan penghambat akan memengaruhi masyarakat dalam melakukan tahapan pemberdayaan guna mencapai tujuan kemandirian dan keberdayaan. Margayaningsih (2018: 80-81) memberikan rekomendasi mengenai faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat. Faktor pendorongnya, meliputi:

- 1) Motivasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah elemen yang berkontribusi dalam pembangunan, terutama selama tahap pemberdayaan masyarakat adalah motivasi dari para pelayan publik. Motivasi masyarakat juga berkontribusi dalam pengembangan potensi suatu daerah, selain motivasi dari perwakilan pemerintah.
- 2) Kebijakan Pemerintah, yakni untuk memastikan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud, para pelaksana pemberdayaan di masyarakat harus memperhatikan berbagai kebijakan pemerintah, baik yang diterbitkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, maupun surat perintah.

Sementara faktor penghambatnya, meliputi:

- 1) Sumber Daya, di mana ketersediaan sumber daya pendukung untuk implementasi suatu kebijakan berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Salah satu sumber daya dapat diidentifikasi dengan melihat seberapa aktif sumber daya manusia mengelola sesuatu atau bagaimana mereka berpartisipasi dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat.
- 2) Sarana dan Prasarana, di mana prasarana berfungsi sebagai penunjang paling penting terhadap terjadinya suatu kegiatan, sementara sarana merupakan sesuatu alat yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan. Pada realitanya, masih banyak ditemui keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tahapan pemberdayaan masyarakat sehingga hal tersebut dapat menjadi penghalang dalam meningkatkan pengembangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dari data yang dihimpun di lapangan (*field research*) dan dianalisis tanpa modifikasi sehingga

hasilnya dapat berupa serangkaian kata yang menggambarkan fenomena yang ditemui selama proses penelitian (Sugiyono, 2013:7). Beberapa narasumber telah dipilih oleh penulis untuk menjadi informan penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013:85) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memperhitungkan informan kunci, di mana subjek informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Karangrejo; Ketua BUMDes Bumi Mulia Karangrejo; Supervisor Balkondes Karangrejo; Koordinator Unit Usaha *Homestay* Balkondes Karangrejo; Ketua TP-PKK Desa Karangrejo; dan *Tour guide* sebagai salah satu masyarakat pelaku usaha di Balkondes Karangrejo. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

1) Tahap Penyadaran

Tahap awal pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terhadap kondisi

lingkungannya yang harus dimulai dari diri sendiri, bahwa mereka memiliki hak dan kemampuan sehingga perlu dibangun dan diberdayakan.

a) Pemetaan Potensi dan Permasalahan di Lingkungan Wilayah Balkondes Karangrejo

Bentuk kesadaran diawali dengan pelibatan masyarakat asli desa untuk bekerja di Balkondes Karangrejo yang diikuti dengan partisipasi pemuda-pemuda desa yang ikut menciptakan lapangan pekerjaan baru dari adanya Balkondes Karangrejo. Selain dimanfaatkan sebagai pengembangan ekonomi lokal, masyarakat Desa Karangrejo melihat potensi dan keberadaan Balkondes Karangrejo ini sebagai destinasi wisata alternatif selain Candi Borobudur. Adapun potensi-potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat lokal melalui Balkondes Karangrejo sendiri selain potensi pariwisatanya yang utama, adalah adanya potensi kuliner dan kerajinan.

Meskipun begitu, pada awal pendirian Balkondes ini juga sempat menimbulkan masalah akibat kesalahpahaman terkait fungsi dan manfaatnya. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa Karangrejo telah merasakan manfaat

dari adanya Balkondes Karangrejo di samping untuk memberikan PADes, tentunya yang lebih penting untuk memberdayakan masyarakat, seperti pemuda-pemudi yang telah lulus dari sekolah atau perguruan tinggi tidak pergi dari Desa Karangrejo, yakni dengan cara membuat usaha atau membuka peluang usaha di desa. Meskipun manfaatnya dinilai belum maksimal, namun sudah banyak memberikan kontribusi kepada desa, seperti pembangunan akses jalan menuju Balkondes Karangrejo yang sekarang sudah dibeli dari PADes yang dihasilkan dari pendapatan balkondes sendiri.

b) Sosialisasi Mekanisme dan Prosedur Kerja Pemberdayaan Masyarakat Melalui Balkondes Karangrejo

Pahun tahun 2017 awal setelah Balkondes didirikan dan diresmikan oleh Menteri BUMN terdapat sosialisasi langsung ke masyarakat. Selain itu, BUMDes Bumi Mulia Karangrejo melibatkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan komponen desa, baik dari Pemerintah Desa Karangrejo, BPD, PKK, Karang Taruna, dan Pokdarwis, yang dikumpulkan di Balai Desa Karangrejo untuk melaksanakan rapat dan musyawarah secara sederhana. Sosialisasi juga diberikan ketika anak-anak muda melakukan

perkumpulan di dusun-dusun untuk diberi motivasi tentang bagaimana menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan melalui Balkondes Karangrejo sehingga dapat memberikan dampak ekonomi.

Balkondes Karangrejo merupakan sebuah inisiatif untuk meningkatkan potensi desa dan memajukan kesejahteraan masyarakat, namun pada tahap pengkajian prosedur sebelumnya, pemerintah lalai untuk melakukan inspeksi dan survei lapangan terlebih dahulu. Pemerintah cenderung menggunakan strategi *top-down* yang mengutamakan konsep pusat tanpa mempertimbangkan potensi kekurangan atau kebutuhan kelompok sasaran. Akibatnya, Balkondes Karangrejo ini menjadi salah satunya balkondes yang dibangun dengan letak yang kurang strategis dan berisiko menjadi tidak berkembang. Hal ini menjadikan beberapa warga lokal kurang berinovatif dan berkreativitas dalam memanfaatkan Balkondes Karangrejo yang berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas tersebut sebagai wadah pengembangan desa.

2) Tahap Pengkapasitasan

Tahap kedua pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menjalankan potensi yang dimiliki wilayahnya.

a) Pemberian Pelatihan atau Pembinaan

Pelatihan yang diberikan, baik untuk pengelola maupun pelaku unit-unit usaha dan masyarakat, hanya fokus pada awal-awal pendirian balkondes saja dan pelaksanaannya tidaklah rutin, namun pelatihan yang diberikan tentunya pelatihan yang memang dibutuhkan sehingga pelaksanaannya cukup mampu mengatasi masalah dan hambatan yang pernah muncul di awal pembangunan balkondes. Setelahnya, mereka menjadi *learning by doing*.

Respons masyarakat desa ketika diberi pelatihan juga antusias dan tertarik untuk belajar menambah ilmu pengetahuan baru sehingga nantinya ilmu tersebut dapat digunakan untuk menambah penghasilan, meskipun partisipasi masyarakat tidak secara keseluruhan, tetapi paling tidak mewakili kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

b) Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengelolaan Balkondes Karangrejo

Koordinasi yang dilakukan antar pengelola dan pegawai Balkondes adalah dengan mengadakan perkumpulan secara triwulan dan juga mengundang pihak pemerintah desa untuk diadakan evaluasi. Sebelum melakukan kegiatan di pagi hari, seluruh pengelola dan pegawai Balkondes selalui melakukan *briefing*, namun mereka juga tetapi mengadakan rapat evaluasi setiap bulannya.

Bentuk koordinasi yang dilakukan antara pengelola Balkondes Karangrejo, BUMDes, dengan masyarakat dilakukan dalam bentuk rapat atau komunikasi secara lisan, tergantung dari kegiatan yang dibutuhkan. Koordinasi dengan masyarakat adalah tugas dari BUMDes karena pihak pengelola Balkondes Karangrejo, terutama supervisor hanya bertanggung jawab khusus untuk operasional yang ada di balkondes saja, sedangkan hubungan antara balkondes dengan masyarakat Desa Karangrejo harus melewati perantara dari BUMDes.

3) Tahap Pendayaan

Tahap terakhir adalah pemberian daya itu sendiri yang bertujuan untuk

memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan dan kualitas masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif secara sukarela sehingga dapat berkelanjutan. Kemudian masyarakat nantinya akan memiliki peningkatan kemampuan melalui *self-evolution* (penilaian diri) atas pilihan mereka sendiri sehingga lebih mandiri.

a) Pemanfaatan Peluang Usaha di Balkondes Karangrejo

Peluang usaha pada bidang UMKM belum sepenuhnya bisa tumbuh dan berkembang, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tidak adanya tempat etalase atau rak khusus di Balkondes Karangrejo untuk memajang atau menjual produk-produk UMKM dari Desa Karangrejo. Meskipun dulu pernah ada program etalase UMKM, *art shop*, atau produk desa yang ditampilkan atau dipajang di Balkondes Karangrejo, namun tidak begitu berjalan karena pada masa awal-awal setelah pendirian balkondes kedatangan tamu belum banyak dan tidak semasif di destinasi wisata sehingga jarang ada yang lihat dan berakhir tidak laku sehingga semangat masyarakat untuk menitipkan produknya di Balkondes sudah menurun dulu. Adapun pemanfaatan peluang usaha melalui paket usaha bernama *traditional farming*, yakni

dengan menjual paket wisata edukasi di bidang pertanian yang melibatkan petani dan anak-anak muda Desa Karangrejo.

b) Peran *Stakeholders* atau Terhadap Balkondes Karangrejo

Kerja sama yang terjalin antara masyarakat desa, pengelola Balkondes dan PGN, serta pemerintah desa untuk menghasilkan sebuah inovasi baru menjadi kunci keberhasilan Balkondes Karangrejo dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa. Selain memberikan fasilitas berupa bangunan fisik pada saat pembangunan balkondes, peran Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai BUMN Sponsor adalah pembangunan Gasblock sebagai ikon gas bumi yang ramah lingkungan dan Desa Energi PGN yang berkelanjutan dengan pembangunan pipa gas sepanjang 3.900 meter untuk melayani 204 sambungan gas bumi rumah tangga bagi warga di sekitar Balkondes Karangrejo, tepatnya disalurkan ke 226 rumah tangga di dua dusun, yaitu Dusun Kretek II dan Dusun Bumen Djelapan serta *homestay* Balkondes Karangrejo yang juga menggunakan pipa energi gas bumi untuk menyalakan pemanas air, meja obor,

obor api abadi, dan perlengkapan lainnya.

c) Pemberian Bantuan Modal untuk Pengembangan Balkondes Karangrejo

Tidak ada pemberian bantuan modal atau anggaran khusus untuk pembangunan dan pengembangan Balkondes Karangrejo. Oleh karena dedikasinya untuk kemandirian, Balkondes Karangrejo jarang meminta bantuan, namun sesekali mereka meminta agar kegiatan PGN dilaksanakan di sana untuk berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan warga setempat agar lebih kreatif dan inovatif.

B. Faktor Pendorong Pemberdayaan Masyarakat Melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

1) Motivasi

Bentuk motivasi yang diberikan dari Kades Karangrejo sebagai Perangkat Desa Karangrejo adalah dengan cara meyakinkan untuk berani dan siap dalam mengambil peluang dan risiko yang terhadap hal-hal yang mungkin

akan terjadi di Balkondes Karangrejo. Kemudian, sebagai penggerak pariwisata, peran Ketua BUMDes Bumi Mulia Karangrejo juga turut berpengaruh dalam pemberian motivasi dengan membangun pola pikir untuk membangun ekonomi dengan memberikan pemahaman terkait pengembangan potensi desa melalui Balkondes Karangrejo. Sementara dari pihak pengelola Balkondes Karangrejo sendiri selalu melakukan briefing setiap harinya sebelum memulai kegiatan. Hal tersebut dapat menciptakan motivasi secara lisan bagi seluruh staf, baik pengelola maupun pegawai di Balkondes Karangrejo.

2) Kebijakan Pemerintah

Program tanggung jawab sosial perusahaan yang dimaksudkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo. Salah satu inisiatif BUMN, yaitu program Balkondes, bertujuan untuk mengembangkan desa-desa di sekitar Candi Borobudur dan memberikan alternatif tujuan wisata bagi para pengunjung. Dalam hal

ini, pemimpin program dan inisiatifnya adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC). Melalui pelaksanaan program “*One Village One BUMN*” yang merupakan perwujudan dari program Sinergi BUMN Hadir Untuk Negeri, program ini merupakan salah satu bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari BUMN yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan.

C. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

1) Sumber Daya

Sumber daya dalam pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo berkaitan dengan ketersediaan dan kecakapan sumber daya manusia yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo. Permasalahan terkait SDM masyarakat masih kerap terjadi di lingkungan Balkondes

Karangrejo, khususnya berkaitan dengan kualitas SDM pegawai yang bekerja di Balkondes Karangrejo secara langsung, salah satunya adalah ketidakdisiplinan karyawan yang bekerja di Balkondes Karangrejo.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan akses yang memadai guna menunjang tahapan pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo. Permasalahan yang masih terjadi terkait hal tersebut adalah masih kurangnya fasilitas penunjang UMKM serta akses jalan menuju Balkondes Karangrejo yang masih terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik dan berhasil, namun masih belum optimal. Tiga tahapan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- 1) Pada tahap penyadaran, masyarakat Desa Karangrejo melakukan pemetaan potensi dan masalah di wilayah lingkungannya, salah satunya dengan bentuk pelibatan masyarakat asli desa yang bekerja di Balkondes Karangrejo. Akan tetapi, pada saat tahap pengkajian atau pengidentifikasian, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan *top-down* yang tanpa melihat potensi masalah dan tanpa melibatkan masyarakat desa.
- 2) Pada tahap pengkapasitasan, pemberian pelatihan atau pembinaan oleh beberapa kelembagaan telah sesuai dengan kebutuhan pengelola, pelaku unit usaha. Akan tetapi, koordinasi yang dilakukan antar sesama pengelola Balkondes Karangrejo dan antara pihak Balkondes dengan masyarakat yang dinilai masih berbelit-belit karena harus melalui perantara BUMDes.
- 3) Terakhir pada tahap pendayaan, pemanfaatan peluang usaha belum terealisasi sebagaimana mestinya karena produk-produk UMKM dari Desa Karangrejo kurang dapat tumbuh dan berkembang dan yang seharusnya bisa menjadi nilai tambah ekonomi dan mendukung pengembangan ekonomi desa justru tidak mendapatkan perhatian khusus untuk ditampilkan

dan diperkenalkan di Balkondes Karangrejo.

Pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo dapat berjalan dengan baik karena adanya motivasi serta adanya dukungan kebijakan pemerintah. Sementara, hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo karena faktor kecakapan sumber daya manusia dan keterbatasan akses jalan.

SARAN

Penulis memberikan beberapa rekomendasi berikut untuk memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo dapat dilaksanakan dengan lebih efektif di masa depan, antara lain:

1. Penyelenggaraan *focus grup discussion* (FGD) bersama *stakeholders* atau pemerintah terkait untuk menggali lebih dalam dan mengkritisi masalah, potensi, serta kebutuhan masyarakat di Desa Karangrejo dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat;
2. Koordinasi yang dilakukan antar sesama pengelola Balkondes Karangrejo dan antara pihak Balkondes dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih

fleksibel terkait pelibatan dan perizinan;

3. Pengadaan kembali program etalase atau rak khusus UMKM, *art shop*, atau produk-produk desa di Balkondes Karangrejo untuk menumbuhkan kembali semangat masyarakat untuk mengembangkan UMKM di Desa Karangrejo;
4. Pemberian motivasi dan pelatihan pada masyarakat Desa Karangrejo terkait pemanfaatan teknologi digital, baik dalam hal pengelolaan, promosi, dan pemasaran;
5. Pemerintah, terutama Kementerian BUMN harus selalu mengawasi, memastikan seluruh masyarakat terlibat, dan mengevaluasi keberlanjutan dari Balkondes Karangrejo dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara lebih lanjut;
6. Masyarakat Desa Karangrejo dapat ikut aktif mengawasi pelaksanaan dari Balkondes Karangrejo apabila terdapat penyimpangan atau ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh pengelola atau pegawai Balkondes Karangrejo dan pemerintah desa beserta pengelola balkondes dapat segera menyusun peraturan tertulis atau SOP guna meminimalisasi tindakan penyimpangan tersebut; serta

7. Pemerintah desa beserta pihak Balkondes Karangrejo harus bisa melakukan teknik negosiasi yang baik dan benar dengan warga yang memiliki lahan untuk dilakukan pembebasan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhian, M. (2017). Dua Program Kementerian BUMN Tingkatkan Perekonomian Desa. *Kata Data*. Tersedia di: <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a5658284d5/dua-program-kementerian-bumn-tingkatkan-perekonomian-desa> [Diakses pada 24 Maret 2023].
- Badan Statistik Kabupaten Magelang. (2021). Kabupaten Magelang dalam Angka. *Website*. Tersedia di: <https://magelangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/4f1f324db0f6cc5ecfd78dc0/kabupaten-magelang-dalam-angka-2021.html> [Diakses pada 24 Maret 2023].
- Banga, W. (2018). *Kajian Administrasi Publik Kontemporer: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dewi, S.F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Balkondes (Balai Ekonomi Desa): Studi Kasus di Balkondes Sakapitu, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. *Skripsi S-1*, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Filia, P.G., dan Alfirdaus, L.K. (2020). Analisis Stakeholder dalam Program CSR-BUMN: Balkondes (Balai Ekonomi Desa) Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(3), 1-10.
- Fitriyanti, A. (2018). Balkondes Pelita Bagi 20 Desa di Borobudur. *Antara News*. Tersedia di: <https://www.antaraneews.com/berita/749932/balkondes-pelita-bagi-20-desa-di-borobudur#mobile-nav> [Diakses pada 24 Maret 2023].
- Ha, R.F.E., dkk. (2022). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik *Home Industry* di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 1-17.
- Hardiyanti, K., dkk. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Balkondes Kabupaten Magelang. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(2), 83-93.
- Hidayah, A.N., dan Agustinah, R. (2019). Balkondes Candirejo Magelang sebagai Bentuk Pengembangan Desa Wisata yang Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 3(1), 70-81.
- Janata, E.S., & Faridatussalam, S. R. (2023). Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Sebagai Pengembangan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Borobudur. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 194-208.
- KabarBisnis.com. (2023). Balkondes PGN Karangrejo Wujudkan Kemandirian Masyarakat Desa. Tersedia di: <https://www.kabarbisnis.com/read/28121519/balkondes-pgn-karangrejo-wujudkan-kemandirian-masyarakat-desa> [Diakses pada 26 Desember 2023].

- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardikanto, T., dan Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Margayaningsih, D.I. (2018). Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.
- Maryani, D., dan Nainggolan, R.R.E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, W.S. (2019). PT Manajemen CBT Nusantara Gelar Balkondes Award 2019 untuk Apresiasi Balkondes di kawasan Borobudur. *Tribun Jogja*. Tersedia di: <https://jogja.tribunnews.com/2019/09/25/pt-manajemen-cbt-nusantara-gelar-balkondes-award-2019-untuk-apresiasi-balkondes-di-kawasan-borobudur> [Diakses pada 24 Maret 2023].
- Oktafiarni, Z.N. (2022). Komunikasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Wisata Karangrejo Borobudur Magelang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi S-1*, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono, S.T. (2022). Tingkatkan Pemberdayaan Ekonomi, PGN Bangun Gasblock di Balkondes Desa Karangrejo. *Tribun News*. Tersedia di: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/03/08/tingkatkan-pemberdayaan-ekonomi-pgn-bangun-gasblock-di-balkondes-desakarangrejo> [Diakses pada 31 Maret 2023].
- Suyanto., dan Aditya, R. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wringinputih, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2), 167-178.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Wijaya, A. F., dan Danar, O. R. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Wrihatnolo, R.R., dan Dwidjowijoto, R.N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Zubaidi, A., dkk. (2022). Kearifan Lokal Desa Wisata Karangrejo dan Karanganyar untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Desa Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), 227-234.